

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia**

###### **2.1.1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). UNDP mendefinisikan bahwa pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Dari pengertian yang diberikan oleh UNDP menjelaskan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan pula dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana prasarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi saja. Konsep ini tidak

hanya menghitung aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi lebih terfokus terhadap peningkatan produk nasional bruto (PNB) daripada memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui terciptanya kesempatan kerja.

Menurut UNDP (1995), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia bersifat timbal balik, artinya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia. Sehingga menjadi sulit bagi sebuah negara dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana utama dalam pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dikutip dari (UNDP, 1995:103), lima poin penting dalam pembangunan sebagai berikut: pembangunan harus mengutamakan masyarakat sebagai pusat perhatian.

- a. pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk seperti berumur panjang dan sehat, dan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan.

- b. pembangunan manusia tidak hanya pada upaya meningkatkan kemampuan manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal.
- c. pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- d. pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut UNDP, indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, pembangunan dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Berbagai negara mengadopsi konsep pembangunan manusia yang digagas oleh UNDP dan tidak sedikit yang mencoba mengaplikasikan penghitungan IPM di negaranya. Indonesia turut ambil bagian dalam mengaplikasikan konsep pembangunan manusia yang dinilai lebih relevan dibanding konsep pembangunan konvensional. Indonesia pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Namun, sejak 2004 IPM dihitung

setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung dana alokasi umum (DAU).

#### **2.1.1.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia**

Pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator yang sudah dikenalkan oleh UNDP tahun 1995, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1995 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut diturunkan empat indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan produk domestik bruto (PDB) per kapita.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Pada tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan produk nasional bruto per kapita. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmetika menjadi geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik.

### 2.1.1.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia menurut *The United Nations Development Programme* (UNDP) dalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) setiap tahun sejak 1996 telah menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) terdiri dari:

#### a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup dilakukan secara tidak langsung (*indirect estimation*) dengan menggunakan dua data dasar yang meliputi rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup menurut kelompok umur wanita pernah kawin dari hasil sensus penduduk 2010. Besarnya nilai angka harapan hidup yang telah disepakati oleh semua pihak. Pada komponen angka harapan hidup batas terendah untuk perhitungan indeks adalah 25 tahun dan tertinggi 85 tahun sesuai dengan standar UNDP.

Agar hasil perolehan data dapat dipertanggungjawabkan, maka digabungkan dengan beberapa informasi yang berkaitan dengan tingkat kesehatan. Indikator yang digunakan dalam perhitungan tersebut di antaranya adalah angka kesakitan penduduk, angka kunjungan ke puskesmas, dan jumlah sarana fasilitas kesehatan per sepuluh ribu penduduk. Oleh karena itu, hasil *proxy* yang diperoleh sebenarnya lebih sesuai disebut indeks *longevity*. Data tersebut telah dikumpulkan oleh BPS dengan sensus atau survei BPS lain atau survei/ pendataan yang dilakukan khusus untuk penyusunan IPM.

b. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP). Batas maksimum tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata lulusan di wilayah tersebut adalah 15 tahun atau setara dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan batas minimal 0 tahun mengindikasikan bahwa tidak ada satu pun yang sekolah di wilayah tersebut sehingga tidak ada satu pun yang lulus atau menempuh jenjang pendidikan.

#### d. Paritas Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Hal ini menyebabkan perbedaan kemampuan daya beli antara masyarakat satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah tersebut maka perlu dilakukan standarisasi.

Standarisasi misalnya satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan adanya standarisasi ini, perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan (Badan Pusat Statistik, 2022).

#### 2.1.1.4 Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum perhitungan indeks pembangunan manusia, setiap komponen dilakukan perhitungan indeksnya terlebih dahulu. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

##### a. Indeks Angka Harapan Hidup

Indeks angka harapan hidup diperoleh dengan cara membandingkan angka yang diperoleh dengan angka yang sudah distandarkan oleh BPS dan UNDP. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks angka harapan hidup adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks AHH} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

## b. Indeks Pendidikan

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AMH = \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas}} \times 100$$

Sedangkan indeks angka melek huruf dirumuskan:

$$\text{Indeks AMH} = \frac{AMH - AMH_{\min}}{AMH_{\max} - AMH_{\min}} \times 100$$

Angka rata-rata lama sekolah diperoleh dengan menggabungkan variabel yaitu tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sebelum dilakukan perhitungan rata-rata lama sekolah, terlebih dahulu diperlukan perhitungan lama sekolah masing-masing individu. Selanjutnya rata-rata sekolah dapat dihitung dengan rumus:

$$RLS = \frac{\sum f_i \times j_i}{\sum f_i}$$

Keterangan:

RLS : rata-rata lama sekolah

$F_i$  : frekuensi penduduk 15 tahun ke atas jenjang pendidikan ke-i

$J_i$  : lama sekolah untuk masing-masing jenjang yang pernah pendidikan yang ditamatkan atau yang pernah diduduki

I : jenjang pendidikan (BPS Yogyakarta, 2014:14).

Indeks RLS dirumuskan dengan rumus:

$$\text{Indeks RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$



Untuk memperoleh indeks pendidikan, indeks angka melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah digabungkan menjadi satu dengan rumus:

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{2}{3}(\text{Indeks AMH}) + \frac{1}{3}(\text{Indeks RLS})$$

c. Indeks Daya Beli

Dalam menghitung konsumsi per kapita riil atau tingkat daya beli penduduk, digunakan beberapa tahap seperti berikut:

- a) menghitung pengeluaran konsumsi per kapita (A);
- b) mendapatkan pola konsumsi Susenas untuk mendapatkan pola IHK yang sesuai (B).
- c) melakukan deflasi nilai A dengan IHK sesuai (C);
- d) menghitung standar daya beli penduduk. Data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini meliputi harga dan kuantum dari satu paket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas. Ke-27 komoditi tersebut meliputi beras, tepung terigu, singkong, ikan tuna/cakalang, ikan teri, daging sapi, daging ayam, telur, susu kental manis, bayam, kacang panjang, kacang tanah, tempe, jeruk, pepaya, kelapa, gula, kopi, garam, merica, mie instan, rokok kretek, listrik, air minum, bensin, minyak tanah dan sewa rumah.
- e) Membagi dengan C dengan PPP per unit (D);
- f) Menyesuaikan nilai dengan formula D dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal dari D (E). Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM**

<b>KOMPONEN</b>	<b>MINIMUM</b>	<b>MAKSIMUM</b>	<b>KETERANGAN</b>
Angka Harapan Hidup (tahun)	20	85	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah (tahun)	0	18	Standar UNDP
Rata-Rata Lama sekolah (tahun)	0	15	Standar UNDP
Daya Beli (rupiah)	1.007.436	25.572.352	Menggunakan PNB riil per kapita yang telah disesuaikan

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Untuk menghitung nilai IPM menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1) + (\text{Indeks } X_2) + (\text{Indeks } X_3)$$

Keterangan :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Indeks  $X_1$  : Indeks Kesehatan

Indeks  $X_2$  : Indeks Pendidikan

Indeks  $X_3$  : Indeks Pendapatan Per kapita

Rumus yang sering digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia sebagai rata-rata geometrik dari setiap nilai perhitungan maka akan dihasilkan angka dalam berupa skor berkisar antara 0-100. UNDP membagi tingkatan pembangunan manusia dalam empat golongan yang dilihat dari tabel tersebut:

**Tabel 2.2**  
**Peringkat kinerja pembangunan**

<b>NO</b>	<b>IPM</b>	<b>KET.</b>
1	$IPM \geq 80$	SANGAT TINGGI
2	$70 \leq IPM < 80$	TINGGI
3	$60 \leq IPM < 70$	SEDANG
4	$IPM < 60$	RENDAH

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

#### **2.1.1.5 Tujuan Indeks Pembangunan Manusia**

Adapun tujuan pengukuran indeks pembangunan manusia di antaranya:

- a. untuk mengukur sebuah dimensi dalam pembangunan manusia yang berupaya dalam membangun kualitas hidup pembangunan manusia;
- b. untuk memberikan asumsi terhadap peringkat pembangunan yang berlangsung ke suatu daerah/negara yang dapat menjadi tolak ukur;
- c. untuk menemukan strategi dalam mencapai kualitas pembangunan di suatu wilayah di satu sama lain;
- d. untuk membentuk sebuah indeks yang komposit;
- e. untuk membangun satu nilai yang mengukur aspek sosial dan ekonomi.

#### **2.1.1.6 Elastisitas**

Menurut Hariadi, Pramono dan Lilis (2008), elastisitas dibagi menjadi dua komponen, yaitu :

##### **1. Elastisitas Permintaan**

Elastisitas permintaan adalah suatu alat ukur kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap suatu perubahan permintaan.

Elastisitas permintaan dibagi menjadi tiga konsep, yaitu :

a. Elastisitas permintaan harga

Elastisitas permintaan harga merupakan tingkat permintaan konsumen atau barang yang dibandingkan dengan perubahan tingkat harga.

b. Elastisitas permintaan silang

Elastisitas silang dapat digunakan untuk mengukur besarnya respon jumlah permintaan silang antara dua jenis barang yang diperlukan untuk melihat tingkat hubungan antara keduanya, baik hubungan yang bersifat saling melengkapi (komplementer) atau hubungan saling mengganti (substitusi)

2. Elastisitas penawaran

Elastisitas penawaran merupakan suatu alat ukur kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan penawaran.

### 2.1.2 Teori Pembangunan

Secara umum, makna pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan dan mengecilnya tingkat pengangguran (Nurcholis, 2016).

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan yang dimaksud diartikan sebagai bentuk perubahan yang

sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011).

Teori pembangunan menurut beberapa ahli yaitu: pembangunan menurut Rostow dalam Halim (2004), pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Selanjutnya menurut Rogers dalam Harun (2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya (Harun, 2011).

Menurut Supardi (1994), pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan itu berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber daya dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu

ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat timbul efek samping berupa produk-produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan yakni untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun pembangunan menurut Tjahja (2000), adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan hal tersebut konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu pendekatan masyarakat ditekankan pada lingkungan sosial ekonomi yang bercirikan : 1) Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan di arahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar 2) Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti terwujudnya pemerataan pendapatan dan mewujudkan keadilan 3) Pembangunan yang berorientasikan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.

### **2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut (Sukirno, 2012) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi bermakna perbandingan produk domestik bruto dan produk

domestik bruto sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan *output* agregat (semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi) atau Produk Domestik Bruto (PDB).

PDB adalah nilai total seluruh *output* akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh penduduk lokal maupun orang asing yang berada di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, indikator umum yang sering digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB nasional atau persentase perubahan PDRB provinsi atau kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu (Devanantyo, 2021).

Untuk menilai pencapaian pertumbuhan, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung pendapatan nasional riil yaitu produk nasional bruto atau produk domestik bruto yang dihitung dengan harga berlaku pada tahun dasar. Nilai yang dihasilkan disebut PNB atau PDB dengan harga efektif tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku untuk setiap tahun. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus Pertumbuhan Ekonomi} = Gt = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_t$  : Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun analisis

$PDRB_t$  : PDRB ADHK pada tahun analisis

$PDRB_{t-1}$  : PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan *output* per kapita dalam jangka panjang. Fokusnya pada tiga aspek yaitu, proses, *output* per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi. Di sini kita melihat aspek dinamis ekonomi, yaitu bagaimana ekonomi berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Fokusnya adalah pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pembangunan ekonomi biasanya didefinisikan sebagai proses peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus menerus, harus diupayakan peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan pendapatan per kapita harus dipertahankan dalam waktu yang lama, dan pada akhirnya memperbaiki sistem kelembagaan di berbagai bidang (seperti ekonomi, politik, hukum, masyarakat, budaya dan lain sebagainya). Dalam hal ini, berarti bahwa pembangunan ekonomi adalah tindakan positif yang harus dilakukan suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah dan seluruh elemen suatu negara perlu terlibat aktif dalam proses pembangunan.



### 2.1.3.2 Ukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung pada peningkatan aktual dalam barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi. Dengan demikian penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara memerlukan perhitungan pendapatan nasional riil yang dikenal dengan produk domestik bruto atau produk nasional bruto.

#### a. Produk Domestik Bruto

Bagi negara berkembang, konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan konsep yang paling penting dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada tahun tertentu. Dalam perekonomian, barang dan jasa yang diproduksi tidak hanya diproduksi oleh perusahaan milik warga negara, tetapi oleh perusahaan milik warga negara yang memproduksi warga negara lain. Pada umumnya, hasil produksi dalam negeri juga berasal dari faktor produksi luar negeri. *Output* yang dihasilkan merupakan bagian yang cukup besar dari kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, nilai produksi yang disumbangkan perlu diperhitungkan dalam pendapatan nasional.

#### b. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat berfungsi sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik yang mencerminkan kesejahteraan penduduk. Hal ini disebabkan perhitungan PDRB yang lebih sempit dibandingkan dengan PDB. PDRB hanya mengukur pertumbuhan ekonomi dalam skala regional,

biasanya provinsi atau kabupaten. Teori ekonomi menemukan bahwa kemauan seseorang untuk bekerja lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat upah yang tersedia. Artinya, semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi pula kemauan seseorang untuk bekerja. Sementara itu, kemampuan seseorang untuk bekerja dipengaruhi oleh kesehatan, keterampilan, kecakapan dan keahliannya. Selain itu, tingkat kecakapan, keterampilan, dan keahlian seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal dan non-formal seperti, pelatihan kejuruan.

#### **2.1.3.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil analisis para ahli di zamannya, pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi beberapa teori, di antaranya:

a. Teori Klasik (Adam Smith)

Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya penambahan penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk maka akan terdapat penambahan *output* atau hasil.

b. Teori Pertumbuhan Neoklasik (Sollow-Swan)

Pertumbuhan ekonomi menurut teori neoklasik dikembangkan oleh Robert Sollow dan Trevor Swan sejak tahun 1950-an. Dalam teorinya disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Berdasarkan hasil penelitian Sollow yang dilakukan di Amerika Serikat, kemajuan teknologi memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Hal itu dibuktikan bahwa pada tahun 1909 sampai dengan tahun 1949 pertumbuhan

ekonomi Amerika Serikat mencapai 2,75 persen per tahun. Kemajuan teknologi memberikan sumbangan lebih dari setengahnya (1,5 persen) dan sisanya disebabkan oleh penambahan jumlah faktor produksi (Arsyad, 2010).

c. Teori Pertumbuhan Endogen

Model pertumbuhan endogen ini menganalisis proses pertumbuhan ekonomi dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap bersifat endogen dan pertumbuhan ekonomi merupakan keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan. Dalam hal ini pengertian modal tidak hanya modal fisik saja, tetapi juga menyangkut modal insani atau *human capital*.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi endogen, perbedaan tingkat pendapatan per kapita antarnegara disebabkan karena adanya alih pengetahuan, kapasitas investasi modal fiskal, modal insani dan infrastruktur. Robert E. Lucas (1998) menekankan pentingnya modal insani dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, Mankiw (1992) mengungkapkan kelemahan teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Salah satunya yaitu adanya asumsi hanya ada satu barang yang tersedia dalam negara, peran pemerintah yang diabaikan, pertumbuhan tenaga kerja, depresiasi dan perkembangan teknologi. Untuk memperbaiki kelemahan teori pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya ketiga tokoh tersebut menambahkan peran teknologi endogen dan modal insani sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Pada model pertumbuhan endogen, fungsi produksi dapat tunjukkan pada rumus berikut:

$$Y = F(R, K, H)$$

Y = Total *Ouput*

R = Penelitian dan Pengembangan

K = Akumulasi Modal

H = Akumulasi Modal Manusia

#### **2.1.4 Infrastruktur Pendidikan**

##### **2.1.4.1 Pengertian Infrastruktur Pendidikan**

Pendidikan merupakan bagian penting dalam pencapaian kapabilitas manusia, yang juga bersifat esensial bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan kapasitas dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable growth*).

Untuk menjadi sebuah negara yang maju, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang maju dan kompetitif. Pemerintah pun sejatinya menaruh perhatian besar bagi pembangunan SDM, ditunjukkan dengan belanja *mandatory spending* pada sektor pendidikan yang sangat besar. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran pendidikan dipatok minimal 20% dari belanja APBN maupun APBD.

Salah satu sumber pendanaan sektor pendidikan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

Infrastruktur Pendidikan memberikan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah, karena dengan sekolah mempunyai infrastruktur yang memadai maka kegiatan pembelajaran pun akan membaik sehingga tingkat kualitas SDM siswa Indonesia akan tumbuh secara baik, hal ini sejalan menurut Todaro & Smith (2011), modal manusia merupakan investasi produktif terhadap orang-orang, mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan gagasan.

DAK Fisik bidang Pendidikan menjadi penyokong utama dalam terbentuknya infrastruktur pendidikan yang layak, DAK bidang pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang belum mencapai standar sarana dan prasana pendidikan SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria, satuan pendidikan yang dimaksud yaitu berbentuk :

1. Taman Kanak Kanan (TK) yang diselenggarakan oleh pemerintah
2. Sekolah Dasar (SD) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat
6. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
7. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diselenggarakan oleh pemerintah.

#### **2.1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri :

1. DAK Fisik Sub Bidang Pendidikan SD
2. DAK Fisik Sub Bidang Pendidikan SMP
3. DAK Fisik Sub Bidang Pendidikan SKB
4. DAK Fisik Sub Bidang Pendidikan SMA
5. DAK Fisik Sub Bidang Pendidikan SMK
6. DAK Fisik Sub Bidang Pendidikan SLB

### 2.1.4.3 Kriteria Lokasi Prioritas

Satuan pendidikan yang diprioritaskan menjadi sasaran penerima program DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

#### 1. Kriteria Umum

- a. Masih beroperasi dan proses pembelajaran masih berlangsung;
- b. Terdaftar resmi yang dibuktikan dengan telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- c. Bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- d. Bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya :
  - 1) Atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
  - 2) Atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - 3) Khusus untuk Provinsi Papua/Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang.
- e. Belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- f. Memiliki kepala satuan pendidikan yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan, khusus bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat adat kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan/ badan hukum;

- g. Memiliki komite sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah, kecuali untuk SKB dan TK;
- h. Tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran yang sama;
- i. Telah mengisi atau telah melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan secara menyeluruh yaitu untuk :
  - 1) SD/ SMP/ SMA/ SMK/ SLB pada laman <http://dapodikdasmen.kemendikbud.go.id>
  - 2) SKB dan PAUD, pada laman <http://dapo.paud-dikmas.kemendikbud.go.id>

## 2. Kriteria Khusus

Kriteria prasarana dan sarana pada satuan pendidikan diprioritaskan menjadi sasaran program DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut.

### a. DAK Reguler

- 1. Rehabilitasi prasarana sebagai berikut :
  - a) Jenis prasarana yang akan direhabilitasi terdapat dalam menu kegiatan;
  - b) Kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 30% sampai dengan 65%;
  - c) Jika kondisi bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 65% dapat dilakukan :
    - 1) Direhabilitasi dengan memperhitungkan biaya sesuai persentase tingkat kerusakan;



- 2) Pembangunan baru kembali dengan syarat telah dilakukan penghapusan aset.
2. Pembangunan prasarana sebagai berikut :
  - a) Jenis prasarana yang akan dibangun terdapat dalam menu kegiatan;
  - b) Tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olahraga, atau fungsi lain;
  - c) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi satuan pendidikan yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih besar daripada jumlah ruang kelas yang tersedia, jumlah ruang belajar belum mencukupi kebutuhan, perlu menambah daya tampung (akses) siswa baru sesuai ketentuan maksimal jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah siswa per kelas sesuai NSP;
  - d) Pembangunan ruang pusat pendidikan inklusif bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi siswa yang berkebutuhan khusus;
  - e) Pembangunan ruang belajar lainnya dan prasarana penunjang pembelajaran diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang belum memiliki sama sekali prasarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;
  - f) Pembangunan prasarana belajar yang belum sesuai standar sarana dan prasarana belajar, dengan syarat telah dilakukan penghapusan aset atau proses penghapusan aset sedang berlangsung.

3. Pengadaan sarana sebagai berikut :

- a) Jenis sarana yang akan diadakan terdapat dalam menu kegiatan;
- b) Satuan pendidikan belum memiliki sama sekali dimaksud dan/atau sudah memiliki namun jumlahnya masih kurang atau kondisinya tidak layak untuk digunakan;
- c) Pengadaan sarana belajar berupa peralatan laboratorium, koleksi perpustakaan, media pembelajaran, dan peralatan pembelajaran lainnya, diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang telah tersedia ruangan atau tempat atau tempat penyimpanan;
- d) Pengadaan sarana belajar berupa peralatan PJOK, peralatan seni dan budaya, dan peralatan kesenian tradisional, diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan ekstrakurikuler, tersedia instruktur/guru pengajar.

b. DAK Afirmasi

DAK Afirmasi digunakan untuk :

- 1) Pembangunan rumah dinas guru SD/SMP/SMA beserta perabotnya dan sanitasinya;
- 2) Pembangunan asrama siswa SMA beserta perabot dan sanitasinya;
- 3) Satuan pendidikan berada di lokasi Kabupaten di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), kecamatan perbatasan negara, wilayah transmigrasi, desa sangat tertinggal/tertinggal yang ditetapkan oleh pemerintah;

- 4) Tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olahraga atau fungsi lain;
- 5) Tersedia lahan yang siap bangun bagi SD/SMP/SMA yang belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan standar bangunan;
- 6) Asrama siswa diprioritaskan bagi SMA yang belum memiliki asrama siswa atau asrama siswa yang tersedia kondisinya kurang, tidak memadai, darurat, tidak sesuai dengan standar bangunan serta pemerintah daerah berkomitmen menyediakan biaya operasionalisasinya melalui APBD atau sumber lain.

c. DAK Penugasan

DAK Penugasan digunakan untuk :

- 1) Jenis prasarana dan sarana yang akan dibangun/diadakan terdapat dalam menu kegiatan;
- 2) Pembangunan prasarana, tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olahraga, atau fungsi lain;
- 3) Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam mendukung sektor unggulan berupa pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya dan/atau pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi,

diutamakan bagi SMK di wilayah sektor unggulan dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Kelautan dan perikanan;
  - b) Ketahanan pangan;
  - c) Pariwisata;
  - d) Energi;
  - e) Industri/industri kreatif.
- 4) Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam rangka pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah diutamakan bagi SMK yang belum memiliki sama sekali prasarana dan sarana yang dimaksud, sudah tersedia namun belum mencukupi, atau kondisinya tidak layak, sebagai berikut :
- a) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
  - b) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi;
  - c) Pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
  - d) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
  - e) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya, bagi SMK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus;
  - f) Rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya untuk ruang belajar dengan kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan antara 30% sampai dengan 65%;

- g) Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya, untuk toilet (jamban) dengan kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan antara 30% sampai dengan 65%;
- h) Pengadaan alat kesenian tradisional, diprioritaskan bagi SMK yang menyelenggarakan ekstrakurikuler, tersedia ruangan/tempat penyimpanan dan tersedia instruktur/guru pengajar.

## **2.1.5 Infrastruktur Kesehatan**

### **2.1.5.1 Pengertian Infrastruktur Kesehatan**

Bidang Kesehatan menjadi salah satu sektor vital yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah, karena faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan infrastruktur kesehatan menjadi penunjang untuk kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Infrastruktur Kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

DAK Fisik Bidang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta peningkatan kegiatan promotif dan preventif, mendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga, terpencil, tertinggal dan kepulauan.

#### **2.1.5.2 Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah kegiatan yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan yang dibiayai DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan terdiri dari :

1. DAK Fisik reguler meliputi :
  - a. DAK Fisik Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar;
  - b. DAK Fisik Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - c. DAK Fisik Reguler Pelayanan Kefarmasian.
2. DAK Fisik Penugasan meliputi :
  - a. DAK Fisik Penugasan Peningkatan Pelayanan Rujukan;
  - b. DAK Fisik Penugasan Pengendalian Penyakit;
  - c. DAK Fisik Penugasan Penurunan Prevalensi *Stunting*;
  - d. DAK Fisik Penugasan Balai Pelatihan Kesehatan
3. DAK Fisik Afiriasi meliputi :
  - a. DAK Fisik Afiriasi DTPK;
  - b. DAK Fisik RS Pratama.

### 2.1.5.3 Kriteria Lokasi Prioritas

#### 1. Kriteria Umum

- a. Daerah yang mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan;
- b. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
- c. Daerah yang merupakan lokus prioritas pembangunan kesehatan (daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan).

#### 2. Kriteria Khusus

- a. Daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan yang belum memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan standar;
- b. Daerah non DPTK yang belum memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar;
- c. Daerah yang mempunyai sarana, prasarana dan alat kesehatan mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasi telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat);
- d. Daerah dengan alokasi belanja obat kurang dari 2 USD per kapita.

Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan meliputi :

#### 1. DAK Fisik Reguler

- a. DAK Fisik Reguler Pelayanan Dasar, diarahkan untuk :
  1. Renovasi/rehabilitasi Puskesmas;
  2. Rehabilitasi sedang dan berta bangunan Puskesmas termasuk rumah dinas tenaga kesehatan;
  3. Pembangunan baru Puskesmas;

4. Pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi Puskesmas dapat disertai dengan penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair dan prasarana di Puskesmas;
  5. Pembangunan gedung *Public Safety Center* (PSC/Pusat Keselamatan Terpadu) untuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
  6. Penyediaan alat kesehatan;
  7. Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
  8. Penyediaan prasarana listrik untuk Puskesmas;
  9. Penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas mengacu pada peraturan daerah setempat tentang penyediaan air bersih;
  10. Penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan;
  11. Pengadaan mesin *fogging*;
  12. Penyediaan *Pusling Single Gardan, Double Gardan, Plusing Air*, kendaraan khusus roda dua untuk program kesehatan di Puskesmas dan atau ambulans transport;
  13. Penyediaan ambulans transport dilengkapi dengan peralatan untuk bantuan hidup/*life support*, dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk kesehatan bergerak/*response unit/quick response vehicle*.
- b. DAK Fisik Reguler Pelayanan Rujukan meliputi :
1. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (Non-Rujukan);
  2. Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)



3. Peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR);
  4. Peralatan kalibrasi di rumah sakit hanya diperuntukkan bagi rumah sakit kelas B dan memiliki tenaga kompeten untuk mengoperasionalkan alat kalibrasi;
  5. Penyediaan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
- c. DAK Fisik Reguler Pelayanan Kefarmasian meliputi :
1. Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat Kabupaten/Kota;
  2. Pembangunan baru, rehabilitasi dan penyediaan sarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK);
  3. Pembangunan baru rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP);
2. DAK Fisik Penugasan
- DAK Fisik Penugasan diarahkan meliputi :
- a. Rumah Sakit Rujukan Nasional;
  - b. Rumah Sakit Rujukan Provinsi;
  - c. Rumah Sakit Rujukan Regional;
  - d. Rumah Sakit di Daerah Pariwisata;
  - e. Pembangunan/renovasi/pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Bantu pendidikan dan pelatihan (SPA) di Balai Kesehatan Provinsi;
  - f. Percepatan penurunan Prevalensi *Stunting*;

g. Pengendalian penyakit.

### 3. DAK Fisik Afirmasi

DAK Fisik Afirmasi diarahkan meliputi :

- a. Peningkatan atau pembangunan puskesmas perbatasan (termasuk peralatan dan prasarana puskesmas)
- b. Peningkatan puskesmas (termasuk peralatan, sarana prasarana dan puskesmas keliling) di daerah tertinggal terpencil, perbatasan dan kepulauan.

#### 2.1.6 Penanaman Modal Asing

Menurut Todaro (2000) “Investasi memainkan peranan penting dalam menggerakkan kehidupan perekonomian bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan pekerjaan”. Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi sering mengarah kepada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada akumulasi modal yang akan meningkatkan *output* potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003).

Teori klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan ekonomi penduduk, makin cepat perkembangan volume stok *capital*

rata-rata per tenaga kerja. Semakin tinggi rasio *capital* per tenaga kerja cenderung semakin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh *neo* klasik, yaitu Sollow dan Swan memutuskan perhatiannya pada bagaimana penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan *output* paling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010)

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai modal asing. Modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing.

Dari definisi dapat dimaknai bahwa modal asing merupakan modal yang dimiliki pihak asing baik berbentuk badan usaha berbadan hukum asing maupun berbadan hukum Indonesia dengan sebagian atau modalnya dimiliki asing. Modal asing juga dapat dikategorikan untuk para pemilik modal asing perseorangan. Investasi dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) sangat bergantung pada elemen-elemen pendukung yang terdapat dalam suatu negara sebagai tolok ukur keberlangsungan dan berjalannya iklim investasi yang kondusif sebagai jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Berikut ini teori para ahli membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing (PMA).

a. Teori Alan M. Rugan

Alan M. Rugman menyatakan bahwa penanaman modal asing dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu ; Ekonomi, Non Ekonomi dan Pemerintah. Variabel ekonomi merupakan elemen paling penting yang menjadi perhatian bagi para penanam modal. Sedangkan variabel non ekonomi mencakup kondisi sosial, budaya dan masyarakat suatu negara. Sementara pemerintah akan selalu diperhatikan oleh investor karena kondisi politik suatu negara akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Sementara variabel lainnya adalah internalisasi yakni keunggulan internal yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.

b. Teori Jhon Dunning

Teori ini merumuskan persyaratan yang terdiri dari tiga hal bila perusahaan ingin berkecimpung dalam penanaman modal asing. Pertama, keunggulan perusahaan yang terdiri dari ; teknologi pemilikan, penelitian, pengembangan, keterampilan manajerial, pemasaran, organisasi perusahaan, diferensiasi produk, merek dagang, nama, ukuran besar yang mencerminkan skala ekonomi dan keperluan modal. Kedua, keunggulan internalisasi dengan asumsi kondisi paragraf di atas terpenuhi. Kondisi yang mendukung internalisasi meliputi ; biaya tinggi dalam membuat kontrak, ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual, keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga. Ketiga ; keunggulan spesifik negara meliputi ; sumber daya alami, kekuatan

tenaga kerja biaya rendah, dan efisiensi serta rintangan perdagangan membatasi impor.

c. Teori David K. Eiteman

Teori ini menjelaskan bahwa penanaman modal asing didasari atas Motif perilaku merupakan motif yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal perusahaan dan organisasi sementara motif ekonomi merupakan motif mencari keuntungan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

### **2.1.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing terhadap indeks pembangunan manusia enam provinsi di pulau Jawa tahun 2018-2023. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, judul dan tahun penelitian	Persamaan variabel	Perbedaan variabel	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saiful & Jumading (2023) “Dampak Fisik Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”.	Variabel independen: DAK Fisik Bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi	Variabel independen: Kemiskinan	Variabel DAK Bidang Pendidikan, Fisik Bidang Kesehatan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	<a href="https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/3429">https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/3429</a>
2	Nur Hairiyah, Akhmad Yafiz, Lisandri (2021), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimediasi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur.”	Variabel independen: Laju Pertumbuhan Ekonomi	Variabel independen : Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Anggaran	Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur.	<a href="http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/">http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/</a>
3	Dzaki Furqoni, Junaidi, Adi Bhakti (2019), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat	Variabel independen: Laju Pertumbuhan Ekonomi	Variabel independen: Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran	Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif signifikan	<a href="https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/11994">https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/11994</a>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-provinsi di Sumatera.”	indeks pembangunan manusia		terhadap Indeks Pembangunan manusia di Provinsi-provinsi Sumatera.	
4	Fikri Ikhsan (2022), “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Asahan 2016-2021.”	Variabel independen: Laju Pertumbuhan Ekonomi Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: Kemiskinan	Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan sementara Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Asahan.	<a href="https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3203">https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3203</a>
5	Anindya Rahardian (2021), “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Ketergantungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.”	Variabel independen: Laju Pertumbuhan ekonomi Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: Kemiskinan, Rasio Ketergantungan	Variabel Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.	<a href="https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/38999/36733">https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/38999/36733</a>
6	Yunita Putri, Wardi Syafmen (2023), “Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jambi Tahun 2011-2022.”	Variabel independen: Laju Pertumbuhan Ekonomi Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: Tingkat kemiskinan,	Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jambi.	<a href="https://onlinejournal.unja.ac.id/multiproximity">https://onlinejournal.unja.ac.id/multiproximity</a>
7	Nasir, Yuslinaini, Hamid, Zulfan,	Variabel independen:	Variabel independen:	Variabel Laju Pertumbuhan	<a href="https://journals.lembagakita">https://journals.lembagakita</a>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Zakaria (2023), “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh.”	Laju Pertumbuhan Ekonomi  Variabel dependen: indeks pembanguna n manusia	PAD, Belanja Modal,	Ekonomi dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sementara variabel Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh.	<a href="http://www.org/index.php/emt/article/view/1199">.org/index.php/emt/article/view/1199</a>
8	Charenza Lazuardy, Sumiyarti (2023), “Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat.”	Variabel independen: Laju Pertumbuhan Ekonomi  Variabel independen: indeks pembanguna n manusia	Variabel independen: Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan	Variabel Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat.	<a href="https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/medek/article/view/18510/10639">https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/medek/article/view/18510/10639</a>
9	Orhan Graham Mzamo (2020), “ <i>IFRS, FDI, Economic Groth and Human Development : The Experience of Anglophone and Francophone African countries</i> ”.	Variabel independen : PMA  Variabel dependen : indeks pembanguna n manusia	Variabel independen : PDB per kapita, inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, perdagangan, pertumbuhan penduduk, dan pendidikan.	Variabel seperti PDB per kapita, PMA, pengeluaran konsumsi pemerintah, perdagangan, pertumbuhan penduduk dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.	<a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1566014119305655">https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1566014119305655</a>
10	Gusti Ayu (2020), “Pengaruh Alokasi Belanja Bidang Infrastruktur Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Bersumber Dari Dana Perimbangan	Variabel independen: DAK Infrastruktur Kesehatan, DAK Infrastruktur Pendidikan	Variabel independen: Infrastruktur Ekonomi	Variabel DAK Infrastruktur Ekonomi dan DAK Infrastruktur Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sementara DAK	<a href="https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/45216/7567658840">https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/45216/7567658840</a> 1



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat”.	Variabel dependen: indeks pembangunan manusia		Infrastruktur Kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM.	
11	Mujibaturrahman, Vivi Silvia (2023), “Pengaruh Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Wilayah Barat”.	Variabel independen: Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen : Laju Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing	Variabel infrastruktur pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	<a href="https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/29302">https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/29302</a>
12	Yuli Wantri, Deden Dinar (2022), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM : <i>Analisa Two Stage Least Square</i> untuk kasus Indonesia”	Variabel independen: PMA, Laju Pertumbuhan Ekonomi Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: Jumlah Penduduk, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah	Variabel PMA, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran pemerintah dan Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan, sementara variabel kemiskinan tidak berpengaruh negatif signifikan.	<a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index">https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index</a>
13	Awal Nopriyanto, Riandy Ibnu, Aswar Rahmat, Taufik Hidayat (2019), “Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara”	Variabel independen: Laju Pertumbuhan Ekonomi Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen : Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan, Penanaman Modal Asing	Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.	<a href="https://jurnal.berida.sultengprov.go.id/index.php/bomba/article/view/20">https://jurnal.berida.sultengprov.go.id/index.php/bomba/article/view/20</a>
14	Ashyafilla Syiffa, Eni Setyowati (2023), Analisis Faktor-Faktor yang	Variabel independen: PMA	Variabel independen: Upah minimum,	Variabel upah minimum dan jumlah penduduk miskin tidak	<a href="https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/slemnasfe/article">https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/slemnasfe/article</a>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2021”.	Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	PDRB Kapita, Jumlah penduduk miskin	Per berpengaruh terhadap variabel PMA dan PDRB Per Kapita mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap IPM.	<a href="https://doi.org/10.30605/le/view/1308450">le/view/1308/450</a> .
15	Mayang Dwi, P.S Prabowo (2022), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap IPM 14 Kabupaten Kategori “sedang” di Provinsi Jawa Timur”	Variabel independen: Laju Pertumbuhan Ekonomi  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: Kemiskinan	Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 14 Kabupaten Jawa Timur.	<a href="https://karya.brin.go.id/id/eprint/19523/1/Jurnal_Mayang%20Dwi%20Pitaloka%20Universitas%20Negeri%20Surabaya%202022-1.pdf">https://karya.brin.go.id/id/eprint/19523/1/Jurnal_Mayang%20Dwi%20Pitaloka%20Universitas%20Negeri%20Surabaya%202022-1.pdf</a>
16	Bella Sandya, Abdul Hakim (2023), “Pemodelan indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”	Variabel independen : PMA  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: PAD, PMDN, AK	Variabel PMA, PMDN, dan AK berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I Yogyakarta	<a href="https://journal.uui.ac.id/JKEK/article/view/29789/15424">https://journal.uui.ac.id/JKEK/article/view/29789/15424</a>
17	Korhan, Martins, Nigar (2018), “ <i>Impact of Foreign Direct Investment on Human Development Index in Nigeria</i> ”.	Variabel independen : PMA  Variabel dependen : Indeks pembangunan manusia	Variabel independen : Laju Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan	Variabel PMA memiliki dampak positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nigeria selama periode sampel.	<a href="https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/download-manager/upload/BERJ9118Article1p.1-13.pdf">https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/download-manager/upload/BERJ9118Article1p.1-13.pdf</a>

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian maka dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

### **2.2.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang baik akan tercapai ketika dibarengi dengan kualitas perekonomian yang baik pula, salah satu indikator untuk tercapainya perekonomian suatu wilayah dikatakan baik ketika masyarakat di wilayah tersebut mempunyai kemampuan daya beli yang baik sehingga dengan hal tersebut secara akan meningkatkan tingkat perekonomian suatu wilayah secara makro, hal ini dapat terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut Ramirez (1998) bahwa terdapat hubungan timbal balik antara *human capital* dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ramirez ini berawal dari terdapatnya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (*human development*). Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat digolongkan menjadi dua kriteria, yaitu seimbang (*balanced*) dan tidak seimbang (*unbalanced*). Selanjutnya untuk yang seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, di mana terjadi hubungan kuat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Dan untuk kategori seimbang yang kedua, berlangsung hubungan lemah antara pertumbuhan ekonomi

dan pembangunan manusia. Kategori tidak seimbang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat (UNDP, 1995).

Pembangunan memiliki tujuan akhir yakni terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini dapat digambarkan dengan suatu negara/wilayah memiliki tingkat perekonomian yang baik dari tiap tahunnya, yakni dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan di tiap wilayah tersebut, pembangunan yang merata akan diikuti dengan pendapatan yang meningkat baik itu barang dan jasa yang diproduksi. Dengan pembangunan yang merata diharapkan tidak terjadinya ketimpangan dalam masalah pembangunan, dan menekan masalah kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahardian (2021) bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, serta sejalan penelitian Lazuardy & Sumiyarti (2023) bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM di Jawa Barat

Dapat dilihat dari pembahasan di atas ada hubungan antara Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga dapat dilihat bahwa ketika Laju Pertumbuhan Ekonomi di suatu wilayah meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia pun akan meningkat.

### **2.2.2 Hubungan Infrastruktur Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Pelayanan pendidikan merupakan hal yang mutlak diberikan pemerintah untuk masyarakatnya, karena hal ini sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk menjalankannya. Salah satu wewenang dari pemerintah adalah memberikan dana pendidikan kepada provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sebagai penjalanan fungsi alokasi dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah dalam perekonomian menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Fungsi alokasi merupakan argumen diberlakukannya desentralisasi fiskal yang berjalan selama ini.

Investasi sektor pendidikan mutlak dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan yang baik (Todaro & Smith, 2011). Alokasi pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang muaranya adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah.

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful dan Jumading (2023) menyatakan bahwa Infrastruktur Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ayu (2020) menyatakan bahwa dana infrastruktur Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dapat dilihat dari pembahasan di atas ada hubungan antara Infrastruktur Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia Sehingga ketika dana

infrastruktur pendidikan meningkat, maka indeks pembangunan manusia meningkat.

### **2.2.3 Hubungan Infrastruktur Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Kesehatan merupakan hal dasar bagi seorang individu untuk menjalankan aktivitasnya, baik itu aktivitas ekonomi maupun aktivitas lainnya. Kesehatan masyarakat kiranya perlu ditunjang dengan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk masyarakat dapat memelihara kesehatannya. Peran pemerintah selaku penyelenggara negara adalah menyediakan serta memfasilitasi layanan kesehatan yang memadai agar kesehatan masyarakat dapat terjaga sehingga tujuan pembangunan pun akan tercapai.

Sama halnya dengan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan pun menjadi hal yang perlu jadi perhatian pemerintah, salah satunya adalah dengan adanya pemerintah menjalankan fungsi alokasi dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi adalah transfer kewenangan serta tanggung jawab fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya (Litvack & Seddon, 1999). Menurut Oates (1999) kewenangan belanja daerah merupakan implikasi kebijakan desentralisasi, dan kesehatan menjadi sektor vital yang menjadi bagian dari kewenangan tersebut. Belanja kesehatan digunakan untuk penyediaan sarana dan alat kesehatan pada puskesmas dan rumah sakit, penurunan angka kematian ibu dan bayi percepatan penurunan *stunting*, pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan dan kefarmasian. Dari hal tersebut dapat tergambarkan jika dana infrastruktur kesehatan itu meningkat serta baik dalam pengelolaannya maka hal

ini akan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat yang muaranya adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Mujibaturrahmah dan Silvia (2023) menyebutkan bahwa infrastruktur kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saiful dan Jumading (2023) menyatakan bahwa infrastruktur kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dapat dilihat dari pembahasan di atas ada hubungan antara Infrastruktur Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia Sehingga ketika dana infrastruktur kesehatan maka indeks pembangunan manusia akan meningkat.

#### **2.2.4 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan Indeks Pembangunan Manusia**

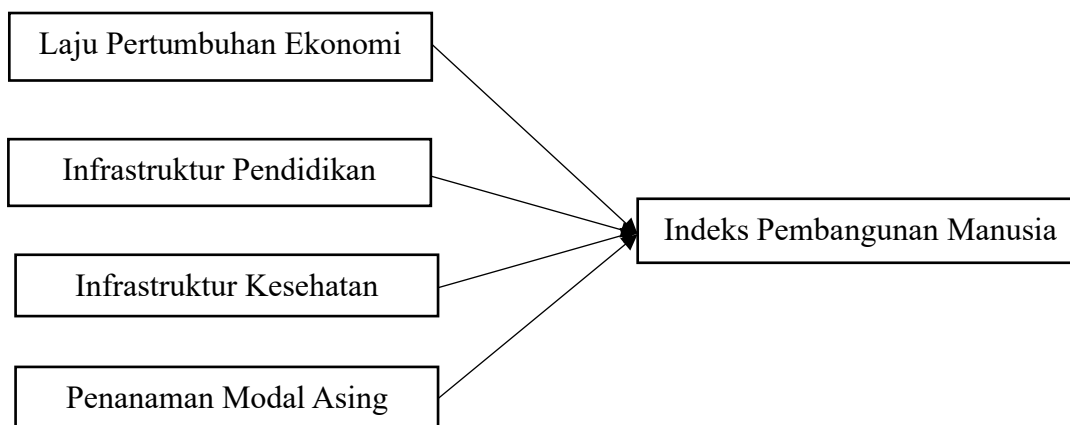
Menurut Todaro dan Smith (2003) penanaman modal masuk sebagai salah satu komponen GDP (*Gross Domestic Bruto*) dapat dipergunakan oleh masing-masing negara untuk meningkatkan pelayanan publik, guna mencapai eksistensi pembangunan nasional. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berupa investasi modal fisik maupun modal manusia. Investasi fisik (*physical invesment*) yaitu di mana semua pengeluaran yang dapat diciptakan modal baru atau meningkatkan stok barang modal (Mankiw, 2006). Sedangkan investasi sumber daya manusia (*human capital invesment*) dapat berupa nilai-nilai pembelajaran dan pengalaman yang ada dalam diri tenaga kerja seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan. Beberapa bentuk investasi sumber daya manusia dapat berupa pendidikan, kesehatan maupun migrasi (Schultz, 1961).

Semakin banyak investasi asing maka indeks pembangunan manusia akan semakin baik. Pentingnya peranan pembangunan manusia dalam investasi tampak pada perhatian berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta yang mengalokasikan investasi maupun belanja daerahnya guna meningkatkan modal manusia tersebut. Investasi yang dialokasikan untuk kepentingan manusia ini tidak serta merta dapat dilihat dalam jangka waktu singkat. Sehingga tidaklah heran bahwa di dalam anggaran pemerintah sering kali terjadi tarik-menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan modal manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Sandya dan Hakim (2023) menyatakan bahwa variabel Penanaman Modal Asing berpengaruh positif signifikan, dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wantri dan Dinar (2022) menyatakan bahwa variabel Investasi asing berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia.



Dapat dilihat dari pembahasan di atas ada hubungan antara Penanaman Modal Asing dengan Indeks Pembangunan Manusia Sehingga ketika penanaman modal asing meningkat maka indeks pembangunan manusia akan meningkat.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dikatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Maka dari rumusan masalah yang ada dapat dibuat beberapa hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian ini :

1. Diduga Laju Pertumbuhan Ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing berpengaruh positif secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia enam provinsi di pulau Jawa tahun 2018-2023.

2. Diduga Laju Pertumbuhan Ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing berpengaruh secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia enam provinsi di pulau Jawa tahun 2018-2023.